

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Nursantri Yanti, Khalish Khairina, Wahyu Syarvina, M. Fauzan, Asmawati, Asiah Wati, Fauzul Hanif Noor Athief, Ichsan, Rahmawati, M. Iqbal, Anton Priyo Nugroho, Iskandar Chang, Malahayatie, Arna Asna Annisa, Asra, Heny Rofizar, Isra Maulina, Lesi Hertati, Reni Ria Armayani Hasibuan

Buku Chapter

MASA DEPAN  
**EKONOMI  
SYARIAH**  
INDONESIA

**Editor :**

**Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.  
Taufiq, SH.I., MA.**

**Pengantar :**

**Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution**

(Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan,  
Ketua DPS Bank Sumut Syariah)

**Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.**

(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya,  
Sekjen Kemenag Periode 2014-2018)

**Dr. H. Danial, S.Ag., M.Ag.**

(Rektor IAIN Lhokseumawe)

**Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat**

(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN LHOEKSEUMAWE**

**BUKU CHAPTER**  
**MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

BUKU CHAPTER  
MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

**Penulis:**

*Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Nursantri Yanti, Khalish Khairina, Wahyu Syarvina,  
M. Fauzan, Asmawati, Asiah Wati, Fauzul Hanif Noor Athief, Ichsan, Rahmawati, M. Iqbal,  
Anton Priyo Nugroho, Iskandar Chang, Malahayatie, Arna Asna Annisa, Asra,  
Heny Rofizar, Isra Maulina, Lesi Hertati, Reni Ria Armayani Hasibuan*

**Editor:**

*Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.  
Taufiq, SH.I., MA.*



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Lhokseumawe**

BUKU CHAPTER  
MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

**Penulis:**

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Nursantri Yanti, Khalish Khairina,  
Wahyu Syarvina, M. Fauzan, Asmawati, Asiah Wati, Fauzul Hanif Noor Athief,  
Ichsan, Rahmawati, M. Iqbal, Anton Priyo Nugroho, Iskandar Chang, Malahayatie,  
Arna Asna Annisa, Asra, Heny Rofizar, Isra Maulina, Lesi Hertati,  
Reni Ria Armayani Hasibuan

**ISBN:**

978-623-96647-3-2

**Editor:**

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.  
Taufiq, SH.I., MA.

**Desain Cover:**

Ade Risma

Cetakan Pertama:

**Januari 2022**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

**PENERBIT:**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM - IAIN LHOKSEUMAWE**  
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe - Lhokseumawe  
Aceh, Indonesia

## *Kata Pengantar*

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Buku Chapter Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia ini merupakan sebuah karya anak-anak negeri ini yang memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya di Tanah Air. Buku ini adalah kolaborasi bersama berupa hasil riset, pemikiran maupun kajian strategis yang dihasilkan oleh 20 orang penulis yang terdiri dari para akademisi, praktisi maupun cendekiawan yang berasal dari 10 Perguruan Tinggi di Indonesia. Berbagai aspek penting yang mencakup masa depan ekonomi syariah di Indonesia sangat detail dibahas dalam buku ini, sehingga buku ini layak dijadikan sebuah rujukan bacaan maupun menjadi bahan pertimbangan berbagai *stakeholder* guna pengembangan ekonomi syariah ke depannya. UPT. Jurnal FEBI - IAIN Lhokseumawe terus berusaha mempublikasikan hasil pemikiran-pemikiran terbaik anak bangsa ini tidak hanya melalui publikasi jurnal ilmiah yang terbit secara berkala, tetapi juga mencoba menyatukan hasil pemikiran tsb melalui buku.

*Tahniah!* Kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi keilmuannya kepada khalayak ramai. UPT. Jurnal FEBI - IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih kepada pihak Dekanat FEBI - IAIN Lhokseumawe yang terus memberikan dukungan guna pengembangan keilmuan, teristimewa kepada Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution (Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara/Ketua DPS Bank Sumut Syariah), Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/Sekjen Kemenag Periode 2014-2018), Dr. H. Danial, M.Ag. (Rektor IAIN Lhokseumawe), dan Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat (Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI) yang antusias memberikan pengantar maupun sambutan dalam buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editor Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Guru Besar UIN Sumatera Utara) dan bapak Taufiq, SH.I., MA. (Wakil Dekan III FEBI - IAIN Lhokseumawe), yang sudi meluangkan waktu untuk melakukan *editing* atas buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat kepada khalayak ramai, mampu meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi bagian dari perjuangan membesarkan ekonomi syariah di negeri dengan mayoritas Muslim ini.

Lhokseumawe, 6 Januari 2022 M  
2 Jumadil Akhir 1443 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
*Kepala UPT. Jurnal FEBI – IAIN Lhokseumawe*

KOLABORASI AKADEMISI UNTUK PENGEMBANGAN  
EKONOMI SYARIAH:

*Serangkai Kata Pengantar Editor*

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Taufiq, SH.I., MA.

Yang diharapkan dari sistem ekonomi syariah adalah perubahan dari *homo economicus* ke *homo ethicus*. Artinya bahwa sistem ekonomi syariah ini akan menjadi ajang kehidupan ekonomi yang tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah implementasi konsep masalah dalam konsumsi dan produksi. Melalui konsep masalah, maka diharapkan tidak terjadi akumulasi modal pada individu-individu tertentu, sehingga akan terjadi kesejahteraan bersama sesuai dengan proporsi ekonomi yang didapatkan atau diperoleh.

Sistem ekonomi Islam tidak memperbolehkan terjadinya *maytsir* di dalam transaksi, larangan *gharar* atau *uncertainty* dalam transaksi, kemudian juga larangan untuk jual beli *mulasamah* dan *munabadzah*, larangan riba/bunga dalam transaksi dan lainnya yang tidak menguntungkan untuk kesejahteraan bersama. *Maytsir* adalah sistem ekonomi yang berbasis *gambling* atau judi. *Gharar* terjadi di dalam akad, yaitu akad yang di dalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan, misalnya dengan melakukan spekulasi, mengandung resiko, bahaya dan ketidakpastian. Selain itu juga harus menghindari sistem *mulasamah* atau membeli sesuatu tanpa melihat secara nyata apa yang dibelinya, *munabadzah* juga sistem jual beli yang juga tidak jelas apa yang dibelinya tersebut. Keduanya mengacu pada sistem jual beli yang tidak diketahui secara jelas, sehingga berpeluang terjadinya penyesalan dan merasa tertipu. Termasuk di sini adalah menjual barang yang belum dimilikinya.

Pandangan fiqih muamalah tentang ekonomi tentu sangat jelas, sebab dapat dibedakan mana yang diperbolehkan atau dianjurkan dan mana yang dilarang atau agar tidak dilakukan. Sebagaimana kajian di dalam fiqih muamalah, maka berbagai transaksi di dalam kegiatan ekonomi yang mengandung aspek *gharar*, riba, *maytsir*, secara tegas dilarang di dalam Islam. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan atau penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus mengandung transparansi, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan bersama secara proporsional. Islam sebagai agama terakhir

dalam jajaran agama *Samawi* memberikan patokan dasar dalam usaha-usaha ekonomi bagi masyarakat.

Dewasa ini perkembangan ekonomi syariah menuai masa yang membanggakan, yaitu melalui dukungan pemerintah yang sangat jelas, misalnya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUI, organisasi percepatan perekonomian syariah dan perbankan syariah, seperti Komite Nasional Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan ketua hariannya adalah Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin.

Yang turut serta membanggakan adalah kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan gabungan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Mandiri Syariah (BSM) dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah). Penggabungan tiga bank syariah yang sangat sehat ini tentu akan dapat menjadi momentum baru bangkitnya perekonomian syariah sebagaimana yang dicitakan oleh masyarakat Indonesia. BSI diharapkan akan dapat menjadi raksasa ekonomi syariah baru di era sekarang dan yang akan datang.

Tidak hanya perbankan syariah yang berkembang tetapi usaha-usaha syariah juga berkembang. Usaha-usaha Syariah (UUS) seperti produk halal, wisata halal, kuliner halal, asuransi syariah, akuntansi syariah, dan sebagainya juga berkembang pesat. Hal ini menandai bahwa telah terjadi proses untuk bergerak lebih cepat dalam kerangka percepatan perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat dari data yang dieluarkan oleh berbagai lembaga ekonomi syariah global, yaitu: berdasarkan *Global Economic Finance*, Indonesia berada di posisi nomor 1 pada tahun 2021, dimana tahun sebelumnya berada di urutan ke-2. Berdasarkan *Global Islamic Economy Report*, Indonesia berada di urutan ke-4 tahun 2021, dan sebelumnya berada di urutan ke-5. Sedangkan berdasarkan *Islamic Finance Development Report*, Indonesia berada di urutan ke-2 dari sebelumnya berada di urutan pertama.

Berdasarkan atas penilaian dari Ekonomi Islam Global ini, maka memberikan indikasi bahwa ekonomi syariah di Indonesia mengalami kenaikan. Artinya bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan infrastruktur organisasi dan keuangan syariah tentu berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi syariah. Dewasa ini juga bergerak dengan cepat tentang perwakafan, zakat, sedekah dan infaq. Melalui keterlibatan masyarakat lewat Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) oleh

pemerintah, maka perkembangan zakat juga akan bisa lebih cepat. Munculnya konsep wakaf uang tentu juga merupakan terobosan dalam rangka memberikan peluang lebih besar pada masyarakat untuk terlibat dalam gerakan filantropi melalui wakaf.

Yang juga terlibat di dalam gerakan ekonomi syariah juga Perguruan Tinggi (PT). Baik PTKI maupun PTU. Perkembangan ekonomi syariah tampak misalnya dengan semakin banyaknya program studi ekonomi syariah, baik di PTKI maupun PTU. Di UIN, IAIN bahkan PTKIS juga banyak berkembang prodi ekonomi syariah. Semuanya memberikan gambaran bahwa era sekarang adalah era ekonomi syariah. Semakin banyaknya PTKI maupun PTU yang memiliki prodi ekonomi syariah tentu berkah sekaligus tantangan, terutama pada alumninya untuk masa depan. Oleh karena itu, selain harus meningkatkan kualitas lulusannya juga relevansinya dengan perkembangan peluang bekerja pada lembaga keuangan syariah yang jumlahnya juga semakin meningkat.

Salah satu diantara upaya untuk terlibat di dalam pengembangan ekonomi syariah adalah yang dilakukan oleh para dosen, yang selama ini terlibat di dalam transfer ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah. Buku yang hadir di hadapan para pembaca adalah usaha yang dilakukan oleh dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia. Ada sebanyak 20 dosen yang juga merupakan praktisi dan peneliti dari 10 perguruan tinggi yang berkolaborasi untuk menulis buku ini. Dari tulisan-tulisan ini, maka bisa diklasifikasi dalam beberapa segmen, yaitu: produk halal, misalnya tentang komoditas makanan dan minuman, kosmetika, *tourisme* halal, dan fesyen Muslim. Kemudian tentang keuangan syariah, misalnya akuntansi syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga non keuangan syariah, sukuk, fintech dan pasar modal syariah. Berikutnya adalah pengembangan SDM ekonomi syariah, misalnya: optimalisasi SDM ekonomi syariah, auditor syariah, dan profesi akuntansi syariah. Tema yang lain adalah: peluang ekonomi syariah, literasi keuangan syariah, perkembangan ekonomi syariah serta regulasi dan dukungan politik untuk pengembangan ekonomi Syariah.

Tulisan yang bervariasi dari para dosen PT ini memberikan gambaran bahwa para dosen memiliki varian di dalam fokusnya dalam mengkaji ekonomi syariah. Namun jika diperhatikan bahwa semuanya merupakan tulisan-tulisan terpilih dengan tema pengembangan ekonomi syariah. Buku ini menyajikan tentang bagaimana ekonomi syariah harus dikembangkan oleh berbagai perspektif, yaitu ada dari pemerintah melalui kebijakan politik yang memihak kepada ekonomi syariah, dan dari akademisi dalam konteks penguatan

pendidikan ekonomi syariah, dari para profesional ekonomi syariah dalam corak penguatan SDM ekonomi syariah.

Buku ini juga dapat dijadikan referensi dan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ekonomi Syariah. Di tengah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka buku sebagai bahan ajar tentu dapat dijadikan sebagai inspirasi penelitian dan kemudian didarmabaktikan untuk pengabdian masyarakat. Pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat adalah tridharma perguruan tinggi yang perlu disinergikan dan dijadikan satu kesatuan untuk kepentingan pendidikan di satu sisi, dan kepentingan masyarakat di sisi lainnya. Selamat membaca....

Medan, 23 Desember 2021

**Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.**  
**Taufiq, SH.I,MA.**

## *Kata Pengantar*

**Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution**  
(Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan/  
Ketua DPS Bank Sumut Syariah)

Bagi Saya, ekonomi syariah memiliki kesan yang mendalam dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidup. Bagaimana bermula sikap apatis Saya terhadap ekonomi Islam hingga berlanjut pada ajakan alm. Tengku H. Rizal Nurdin (Mantan Gubernur Sumatera Utara) untuk mengikuti seminar dan *workshop* ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh *International Islamic University Malaysia (IIUM)* di Malaysia pada tahun 1991. Kegiatan tersebut seolah menyadarkan, membuka mata Saya dan memberikan segenap semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah bersama para *stakeholder* khususnya di Provinsi Sumatera Utara pada saat itu.

Saat ini kita ketahui ekonomi syariah tengah *booming* dan bagian *trend* yang telah menjadi *life style* tidak hanya bagi kaum Muslimin tetapi juga bagi segenap penduduk di tanah air. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah bagi masyarakat Indonesia telah menunjukkan bahwa bermuamalah sesuai dengan syariat Islam merupakan ajaran yang *universal* dan bahagian dari Islam yang *Rahmatan lil'alam*. Ekonomi syariah saat ini tidak lagi pada masa perkembangan di awal yang kita kenal hanya pada sektor keuangan dan perbankan, namun telah berkembang pada seluruh aspek bermuamalah sesuai syariat di dalam kehidupan, mulai dari *halal food*, destinasi pariwisata halal, *halal cosmetics*, maupun aspek-aspek lainnya yang berkaitan erat dengan aktifitas kehidupan masyarakat.

Berbicara masa depan merupakan sesuatu hal yang kompleksitas. Masa depan merupakan gambaran yang terbentuk dari sekumpulan upaya dan asumsi dari pengalaman masa lalu, yang berinteraksi dengan informasi dari lingkungan untuk membentuk harapan mengenai masa depan, membentuk tujuan, dan aspirasi serta memberikan makna pada kejadian di masa depan. Untuk itu tentunya kita semua tentu berharap masa depan ekonomi syariah di Indonesia semakin cerah dan mampu menjadi sebuah solusi atas permasalahan ekonomi yang selama ini terjadi, sehingga *falah* yang selama ini menjadi tujuan dari ekonomi syariah dapat tercapai.

Buku *chapter* Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia ini merupakan cerminan bagaimana kondisi ekonomi syariah saat ini di Indonesia, serta upaya yang dibangun oleh para penulis dalam menggali dan menguraikan melalui hasil pemikiran maupun riset tentang kondisi ekonomi syariah yang ada pada saat ini dan tentunya masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Apresiasi saya kepada seluruh penulis yang turut serta dalam perjuangan membesarkan ekonomi syariah di Indonesia melalui tulisan ini, dan tentunya kepada pihak UPT. Jurnal IAIN Lhokseumawe yang mampu menginisiasi terbitnya buku ini. Tentunya hal ini akan menjadi amal kebaikan dan bagian dari upaya para akademisi, praktisi dan cendekiawan berjuang melalui “kekuatan” yang dimiliki.

Medan, 6 Januari 2022

**Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution**

*Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan*

*Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah*

**DUKUNGAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN INSTITUSI  
PENDIDIKAN TINGGI UNTUK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA:**

***Sebuah Kata Pengantar***

**Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.**

*Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/  
Sekjen Kemenag RI Periode 2014-2018*

**Pendahuluan**

Sebagai akademisi yang selama ini berkecimpung di dalam program pembelajaran, terutama Metode Studi Islam, termasuk Studi Ekonomi Syariah, pada Program Doktor di UIN Sunan Ampel dan di UIN Mataram dan UIN Malang, maka saya tentu menyambut dengan riang gembira ketika diminta untuk memberikan “Kata Pengantar” dalam buku yang disusun oleh 20 dosen dari berbagai Universitas di Indonesia dengan tema “Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia”. Buku ini diedit oleh Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Dosen Ilmu Fiqh pada UIN Sumatera Utara) dan Sdr. Taufiq, SH.I., MA. (Wakil Dekan III FEBI - IAIN Lhokseumawe). Sebuah buku yang bisa menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi dan peminat studi ekonomi Syariah di berbagai universitas di Indonesia.

Ekonomi Syariah di Indonesia, sesungguhnya telah memasuki era baru melalui dukungan penuh dari pemerintah. Jika dilacak secara historis, maka bisa diketahui di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka pengembangan ekonomi Syariah telah dilakukan, misalnya dengan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES), yang diresmikan oleh Presiden SBY untuk memberikan dukungan khususnya bagi pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Di era ini juga dukungan dari para akademisi dan praktisi ekonomi Syariah juga sangat kuat, misalnya keterlibatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang secara meyakinkan telah memberikan sejumlah solusi tentang bagaimana seharusnya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka keterlibatan pemerintah juga semakin kuat, misalnya lahirnya organisasi semi pemerintah, yaitu Komite Nasional Ekonomi Syariah, yang melibatkan para Menteri dan tokoh-tokoh perbankan dan akademisi untuk terlibat di dalam program percepatan pengembangan ekonomi Syariah. Di dalam perkembangannya, KNKS kemudian menjelma menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang langsung dipimpin oleh presiden, dengan ketua hariannya adalah Wakil Presiden dan beberapa Menteri yang terkait.

Perkembangan dukungan pemerintah yang luar biasa tentu menjadi cambuk bagi dunia perbankan Syariah dan keuangan Syariah.

Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, maka terdapat klaster yang penting untuk diperhatikan, yaitu: **pertama**, Penguatan Rantai Nilai Halal: Klaster Makanan dan Minuman halal, klaster pariwisata halal, klaster fesyen Muslim, klaster Media dan Rekreasi Halal, Klaster Farmasi dan kosmetik Halal, Klaster energi terbarukan. **Kedua**, Penguatan Keuangan Syariah: klaster perbankan Syariah, Klaster Pasar Modal Syariah, klaster jaminan sosial, zakat dan wakaf. Selain ini juga terdapat penguatan usaha kecil, mikro dan menengah dan penguatan ekonomi digital. Di dalam kata pengantar ini tidak semua klaster dibahas, akan tetapi hanya klaster jaminan produk halal, zakat, wakaf dan kerja sama kelembagaan untuk pengembangan ekonomi Syariah.

### **Potensi Produk Halal di Indonesia**

Potensi produk halal Indonesia sangat besar, misalnya produk makanan dan minuman, perdagangan, parfum dan komestik, obat-obatan, wisata atau *tourism*, dan barang gunaan.

Indonesia memiliki sejumlah ikon wisata yang sangat masyhur, baik wisata religious maupun non-religious. Yang religious, seperti makam para wali, situs-situs keagamaan, dan nonwisata religious seperti pantai, hutan, gunung, teluk, danau, bawah laut dan air terjun.

Indonesia juga memiliki sejumlah produk kerajinan, rumah batik, rumah adat, desa adat, desa wisata, dan lainnya. Indonesia memiliki potensi kesenian dan budaya yang bisa menjadi momentum wisata local maupun internasional. Indonesia memiliki pusat-pusat perdagangan yang bertaraf internasional, baik di Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Surakarta, Semarang. Misalnya konsep Joglo Semar, dan sebagainya.

Di dalam *Global Islamic Economy (GIE)* dijelaskan bahwa negara-negara non-Muslim justru menjadi pengeksportir besar pada produk-produk halal, misalnya Australia menjadi pengeksportir daging halal ke seluruh dunia, bahkan Vietnam dan Thailand menjadi pemain besar dalam perdagangan syariah dan kemudian Jepang melalui *halal food*.

Indonesia belum dapat menguasai pasar syariah, tetapi negara-negara non-Muslim lainnya sudah mampu. Indonesia belum bisa menjadi pemain karena variabel harga yang masih tinggi, kemasan yang kurang baik dan kapasitas

produk yang belum optimal. Indonesia sudah masuk 10 besar negara yang memproduksi produk halal, dalam bidang *Halal Food, Islamic Finance, Mode Fashion, Halal Pharmaceutical and Cosmetics*.

Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, ternyata justru hanya menjadi pasar produk halal dan belum bisa menjadi produsen produk halal. Bandingkan dengan Brazil yang jumlah umat Islamnya sangat sedikit, hanya 0,0002 persen dari populasinya ternyata justru menjadi pemain kuat di dalam produk halal. Brazil sekarang ini sudah menjadi pemain besar dalam makanan halal.

Berdasarkan tulisan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, bahwa pada tahun 2018, Indonesia membelanjakan 173 Milyar dollar AS untuk makanan dan minuman halal atau sebesar 12,6 persen dari pangsa produk makanan halal dunia. Indonesia memang bisa menjadi pasar bagi produk halal, sebab mayoritas penduduknya beragama Islam dengan komitmen yang tinggi untuk menggunakan produk halal. Usaha-usaha yang optimal telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan diterbitkannya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan Menteri-menteri terkait, lalu mergernya bank-bank syariah (BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia, yang berdasarkan potensi dan peluang akan bisa bersaing di dunia perbankan syariah dunia. Pada tahun 2018 pasar halal dunia mencapai 2,2 trilyun dollar AS, dan tahun 2024 mencapai sebesar 3,2 trilyun dollar AS. (Kompas, 17/02/2021).

Dukungan pemerintah Indonesia yang sedemikian kuat belum disambut dengan gegap gempita oleh para pengusaha khususnya pengusaha menengah atas. Yang bisa dilihat barulah pada usaha-usaha syariah dalam skala menengah, dan kecil. Sebenarnya, potensi makanan Indonesia sangat luar biasa. Jenis dan macam makanan yang terdapat di Indonesia sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan komoditas di dunia internasional. Hanya saja kebanyakan masih merupakan usaha-usaha yang berskala mikro dan belum bisa memasuki pangsa pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi: **pertama**, memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam menyongsong era produk halal yang terus berkembang. Tuntutan dan gaya hidup masyarakat Muslim yang semakin religius, semestinya menjadi tantangan bagi dunia usaha untuk menangkapnya. Dewasa ini *life style* masyarakat Muslim semakin mengarah kepada religiusitas dengan *performance* yang ingin ditampakkannya.

Wisata halal, perbankan syariah, makanan dan minuman halal, penggunaan produk keuangan Syariah, kegiatan filantropi, dan fashion syariah telah menjadi gaya kehidupan masyarakat Muslim khususnya kelas menengah. Dengan demikian, usaha pemerintah untuk menaikkan keuangan syariah, perbankan syariah dan produk syariah semestinya ditangkap sebagai peluang yang besar.

**Kedua**, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer. Makanya, kebutuhan akan makanan dan minuman tidak akan pernah berhenti kapan dan dimanapun. Di tengah gelegak kehidupan masyarakat yang semakin religius, maka mau tidak mau harus tersedia pemenuhan kebutuhan primer berlabel halal. Dalam lima tahun ke depan, seiring dengan literasi produk halal, maka masyarakat akan melakukan pilihan dalam menentukan keputusan membeli atau tidak membeli makanan dan minuman. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali para pengusaha menengah dan besar untuk bermain di sektor makanan dan minuman halal. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja dengan jumlah umat Islam 87 persen, tentu membutuhkan produk halal yang cukup banyak. Di sisi lain, juga kebutuhan pasar internasional yang juga akan semakin besar. Seharusnya mulai dipikirkan bagaimana para pengusaha menengah dan besar untuk bisa menguasai pasar Timur Tengah yang tingkat literasi produk halalnya sudah sangat baik.

**Ketiga**, jika pengusaha menengah dan mikro bisa bermain dalam kawasan regional dan nasional, maka para pengusaha menengah dan besar harus bermain di sektor internasional. Yang dilakukan oleh Brazil dengan BRF yang membuka ekspansinya melalui peresmian pabrik makanan halal terbesar di Uni Emirat Arab adalah contoh bagaimana Brazil menangkap peluang usaha. Strategi Brazil ini tentu disebabkan oleh diplomasi pemerintah yang kuat dan juga dukungan pengusaha besar di Brazil. Seandainya ada ekspansi perusahaan besar dari Indonesia, tentu negara Timur Tengah akan memilih bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Namun demikian, kiranya politik perdagangan harus dimainkan agar peluang usaha tersebut akan bisa menjadi realitas.

### **Potensi Filantropi di Indonesia**

Zakat, wakaf, sedekah dan infaq merupakan *public fund* yang keberadaannya dijamin oleh agama. Artinya, bahwa agama memiliki sejumlah konsep yang terkait dengan ajaran ini. Ajaran filantropi merupakan prinsip mendasar di dalam agama Islam, selain syahadat atau persaksian tentang keberadaan Allah

dan utusannya, lalu shalat yang merupakan ritual sebagai tiang agama, dan puasa untuk menahan makan, minum dan relasi seksual di siang hari, serta haji ke Ka'batullah. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dengan demikian ajaran mengeluarkan sebagian harta untuk zakat merupakan perintah agama yang mendasar.

Zakat dikenal memiliki beberapa dimensi, yaitu zakat harta, zakat fitrah, zakat profesi, zakat pertanian dan peternakan. Semua zakat ini memiliki takaran sesuai dengan aturan di dalam agama atau hukum fiqih. Misalnya zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5 kg beras atau setara itu, lalu zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji, dan zakat harta, peternakan dan pertanian tentu sesuai dengan kaidah yang sudah termaktub di dalam ilmu fiqih.

Selain dana zakat yang harus dikeluarkans sesuai dengan nisabnya, maka juga terdapat dana wakaf, infaq dan sedekah. Masing-masing memiliki karakteristiknya, dan cakupannya sesuai dengan prinsip di dalam ajaran Islam. Wakaf merupakan pengeluaran oleh individual atau sekelompok individu dan lembaga yang memberikan barang atau uang kepada pengelola wakaf untuk kepentingan membangun umat Islam di manapun. Sedangkan infaq dan sedekah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh individu yang berinfaq dan bersedekah. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dikeluarkan oleh individu, kelompok atau institusi yang diserahkan pengelolaannya kepada nazir wakaf untuk tujuan kemaslahatan umat.

Indonesia memiliki peluang yang besar dalam *public fund* yang berupa wakaf. Hal ini tentu dikaitkan dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai 87 persen populasi di Indonesia dengan kemampuan finansial dan aset yang relatif memadai. Melalui prediksi yang dilakukan oleh Baznas (2020), maka potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp178,65 trilyun sampai Rp180 trilyun.

Kelas menengah, termasuk ASN, berkecenderungan untuk mengeluarkan anggaran belanja untuk philantropi yang semakin menguat. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Alvara Research Center, bahwa belanja amal sebanyak 5 persen dari porsi belanja rumah tangga atau total pengeluaran. Belanja tersebut meliputi tabungan 12,6 persen, investasi 3,1 persen, asuransi 7,3 persen, cicilan hutang 9,8 persen, kebutuhan keluarga 43,7 persen, zakat/amal 5 persen, telepon 5,4 persen dan hiburan/*entertainment* sebesar 7,5 persen (Baznas, 2021). Melalui angka-angka ini tentu bisa diprediksi besaran potensi wakaf uang yang bisa dikeluarkan oleh ASN di Indonesia.

Berdasarkan atas porsi belanja amal sebesar 5 persen dari total pengeluaran, maka diperkirakan bahwa akan terdapat sebanyak 29 juta KK x Rp7,5 juta (expenses perbulan) x 5 persen maka akan terdapat angka Rp10,875 trilyun, sehingga dalam satu tahun akan didapatkan angka sebesar Rp130 trilyun. (Baznas, 2021). Melalui angka-angka prediktif ini, maka kiranya dapat dikalkulasi bahwa potensi wakaf uang di kalangan ASN dengan menggunakan perhitungan jumlah ASN Muslim sebesar 3.654.000 orang, maka akan ketemu angka sebesar Rp. 4,1 trilyun per tahun.

### **Mendorong Program Sertifikasi Halal**

Jumlah pengusaha kecil yang memang wajib sertifikat sesuai regulasi yang berlaku tentu sangat banyak. Usaha dalam sektor makanan dan minuman, serta usaha-usaha barang guna tentu juga sangat banyak jumlahnya. Usaha ini kebanyakan dimiliki dan dikembangkan oleh pengusaha kecil dan mikro yang memiliki sasaran kelas menengah ke bawah dan dengan harga terjangkau. Mereka merupakan usaha-usaha rumahan yang dikelola dengan manajemen tradisional dan dipasarkan secara terbatas.

Industri makanan dan minuman sampai saat ini masih menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, maka pertumbuhan industri makanan dan minuman masih cukup menjanjikan. Untuk tahun 2021, Kemenperin masih memprediksi bahwa pertumbuhan industri makanan masih berkisar pada angka 4,49 persen, sedangkan industri minuman sebesar 4,39 persen. Namun peluang realisasinya untuk makanan dan minuman sebesar 4,44 persen pada tahun 2021. Namun demikian, para pengusaha memprediksi di atas angka tersebut (Tempo.co diunduh 24/02/2021). Pertumbuhan sebesar ini bisa diharapkan dengan catatan bahwa penanganan Covid-19 *on the track* dan angka penyebarannya menjadi lebih kecil atau mengecil.

Sesuai dengan regulasi bahwa mulai 17 Oktober 2019 dan seterusnya dinyatakan bahwa semua produk, baik makanan atau minuman, kosmetik dan obat-obatan serta barang guna harus terjamin kehalalannya atau bersertifikat halal. UU No 33 tahun 2014 menyatakan bahwa semua produk harus bersertifikat pada lima tahun setelah UU ini diundangkan, artinya semua produk di Indonesia harus bersertifikat halal. Probleminya adalah pada aspek industri kecil dan mikro yang kebanyakan merupakan industri rumahan dan dikelola secara tradisional. Jumlahnya mencapai jutaan, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan sertifikasinya.

Pemerintah berupaya *shortcut* dengan cara *self declare*. Pengusaha harus menyatakan bahwa produknya halal, karena sumber dan teknik yang digunakan sesuai dengan standat halal. Misalnya produk makanan dipastikan bahwa sumber atau bahannya halal dan proses atau tekniknya juga halal. Inilah yang kemudian bisa memastikan bahwa produk tersebut bisa dinyatakan sebagai produk halal. Termasuk juga produk minuman, misalnya minuman dalam kemasan botol seperti minuman beras kencur, jahe merah, jeruk nipis, kopi sachet, asem dan susu sapi perahan, dan sebagainya harus halal dengan cara *self declare* dimaksud. Demikian pula produk makanan kaki lima, seperti nasi goreng, nasi udak, nasi tumpeng, nasi kebuli, tahu goreng, pisang goreng dan sebagainya juga harus jelas halal dengan cara *self declare*.

Namun demikian, *self declare* harus sesuai dengan regulasi dan etika yang berlaku. Makanya ada beberapa catatan yang penting di dalam upaya *self declare*, yaitu: **Pertama**, *self declare* merupakan upaya pemerintah untuk memberi peluang usaha secara lebih berkembang dengan mengedepankan pada transparansi dan kejelasan produk tersebut sehingga dapat menjadi jaminan ketidakraguan konsumen yang memanfaatkan. Di sini maka para pengusaha diminta untuk mengembangkan budaya kejujuran dan keterbukaan. Jangan melakukan kebohongan publik tentang produk yang dipasarkannya.

**Kedua**, diharuskan ada pendampingan di dalam pengembangan usaha berbasis *self declare*, misalnya Perguruan Tinggi, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan juga masyarakat lainnya. Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau organisasi sosial keagamaan untuk melakukan pendampingan atas *self declare* para pengusaha makanan dan minuman. Institusi ini memiliki dan menjadi penjamin kehalalan produk yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM. Dengan demikian secara regulatif dan etik, maka terdapat lembaga yang bertanggungjawab atas kehalalan produk.

**Ketiga**, sebagai pendamping dan penjamin kehalalan produk, maka tentu diharuskan untuk melakukan *testing* atau pemeriksaan atas kehalalan produk. Secara periodik dapat dilakukan uji kehalalan dan hasilnya bisa di-*share* melalui media massa atau media sosial terhadap kehalalan produk. Budaya tanggungjawab dan etika berusaha ini harus ditanamkan dengan cara melakukan inspeksi mendadak dan pengambilan sampel tentang produk makanan dan minuman untuk diuji kehalalannya.

**Keempat**, melalui proses yang “berbelit” untuk memperoleh sertifikasi, maka menjadi mustahil jika pada tahun 2019 dan seterusnya akan terjadi *booming*

sertifikasi produk halal khususnya pada industri makanan dan minuman. Tidak hanya prosedur administrasinya akan tetapi juga anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu anggaran untuk sertifikasi produk makanan dan minuman untuk jutaan pengusaha tentu tidak mungkin dianggarkan. Anggaran pemerintah untuk program sertifikasi halal tidak akan mencukupi untuk menjangkau semua industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, melalui *self declaration* diharapkan bahwa akan tumbuh industri makanan dan minuman halal yang berstandart regulasi dan etika.

**Kelima**, upaya *shortcut* yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu akan memiliki dua matra sekaligus, yaitu memotong mata rantai jaminan produk halal yang rumit dan terbatas kapasitasnya, sehingga akan memudahkan bagi para pengusaha untuk masing-masing menjamin bahwa produknya halal sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh institusi terkait, lalu juga bisa menjadi penjamin bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi halal. *Self declare* tidak dimaksudkan untuk melakukan “penipuan” kepada konsumen atas produk yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, para pengusaha akan bergairah untuk berusaha dan konsumen juga akan yakin bahwa yang dikonsumsi juga halal. Sekarang masyarakat Indonesia sedang menuju menjadi masyarakat yang lebih *religious*, yang ditandai dengan yang serba syariah, misalnya: makanan dan minuman halal, wisata syariah, hotel syariah, pakaian halal, kosmetik halal, bahkan juga obat-obatan halal. Dengan upaya *shortcut* ini, maka ke depan akan dapat dipastikan bahwa gaya hidup halal akan menjadi trend dan para pengusaha dapat pula memenuhi kebutuhannya.

### **Membangun Kemitraan dengan Perguruan Tinggi**

Ada beberapa alasan tentang pentingnya kerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi (PT) untuk pengembangan ekonomi syariah, yaitu; **Pertama**, Perguruan tinggi merupakan mitra strategis bagi perbankan syariah, sebab selain memiliki mahasiswa dan keluarga juga memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang tentu potensial dalam rangka terlibat di dalam pengembangan perbankan syariah. Tidak hanya akan bisa menjadi nasabah tetapi juga mitra strategis untuk memperkuat jaringan pengembangan keuangan syariah, baik keuangan inklusif maupun noninklusif. Selain itu PT juga memiliki sejumlah pakar dalam bidang ekonomi syariah, baik sebagai dosen maupun praktisi perbankan syariah. Melalui mereka maka akan bisa dikembangkan upaya-upaya inovatif untuk pengembangan usaha-usaha

syariah maupun perbankan syariah. Misalnya melalui disertasi yang dihasilkan oleh PT, maka didesain untuk problem solving percepatan pengembangan keuangan syariah dan perbankan syariah.

**Kedua**, dewasa ini sedang digalakkan program wakaf uang. Potensi wakaf uang ini luar biasa. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BWI, maka potensi wakaf uang Indonesia mencapai angka Rp. 180 trilyun. Sedangkan potensi wakaf uang ASN se-Indonesia sebesar Rp. 3 trilyun per tahun (data BWI) atau 4,1 trilyun per tahun (Nursyamcentre dan dipublis oleh Kemenag). Artinya, bahwa wakaf uang bisa menjadi dana publik atau *public fund* yang bisa didayagunakan untuk pengembangan Pendidikan.

**Ketiga**, pemerintah sedang menggalakkan produk halal. Indonesia setiap tahun membelanjakan impor produk halal sebanyak 173 Milyar dollar US atau sebesar 12,5 dari produk halal dunia. Artinya pengeluaran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan produk halal di Indonesia cukup besar. Dilakukan impor sebab produk halal Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sesungguhnya sudah membuat *short cut* untuk memberikan “kemudahan” bagi para pengusaha UMKM, yaitu melalui skema *self declair*. Melalui skema seperti ini, maka sudah dilakukan pemangkasan pembiayaan, rentang waktu dan proses yang relative berbelit di dalam UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah telah berupaya untuk menolong para pengusaha yang berkeinginan untuk program sertifikasi halal. Tentu jangan dianggap dengan *self declair* segala sesuatunya menjadi mudah, sebab tetap harus ada proses pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan tinggi atau organisasi sosial keagamaan atau Lembaga professional lainnya. UIN yang sudah memiliki laboratorium uji halal tentu bisa melakukan pendampingan ini secara terstruktur dan sistematis. UIN yang akan mendeklar terhadap kehalalan produknya. Di sini tentu ada label, institusi pendamping dan pemberitaan di media sosial.

**Keempat**, kemitraan strategis dengan Perbankan Syariah adalah tentang mendesain program, melaksanakan program dan evaluasi program. Desain program terkait dengan bagaimana merancang program pendampingan terhadap sejumlah UMKM (misalnya UMKM di bidang makanan dan minuman). Lalu bagaimana program ini diselenggarakan, misalnya dengan melakukan pemetaan UMKM di wilayah Jawa Timur dan berapa yang bisa dibantu untuk *self declair*. Penting juga dilakukan evaluasi dan monitoring untuk tetap memberikan jaminan bahwa produk dimaksud tetap menjaga

kehalalannya. Melalui program evaluasi dan monitoring, maka akan didapati compliance para pengusaha terhadap label halal melalui *self declair*.

**Kelima**, Perguruan Tinggi harus segera merumuskan kerja strategis terkait dengan wakaf uang dan jaminan produk halal. Ke depan dua area ini akan menjadi andalan. Dunia jaminan produk halal membutuhkan Lembaga yang memiliki kapasitas untuk menjadi Lembaga pemeriksa Halal (LPH) dan juga pendamping UKM/UMKM untuk *self declair* yang juga membutuhkan penyelia halal baik bagi pengusaha (UMKM) atau LPH dan Pendamping JPH. Tentu lalu juga dibutuhkan program studi Audit Halal, yang memiliki tiga fokus yaitu auditor keuangan syariah, auditor perbankan syariah dan zakat dan wakaf (zawa). Sudah saatnya kemitraan strategis ini bekerja untuk memenuhi pangsa pasar ke depan yang variatif dan potensial, sehingga peran PTKIN dan perbankan Syariah untuk mendongkar keuangan Syariah akan semakin nyata.

## **Penutup**

Indonesia merupakan negeri dengan jumlah umat Islam terbesar, sehingga potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah tentu sangat besar. Namun demikian masih diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk bisa merealisasikannya. Indonesia diharapkan bisa menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah, karena dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah juga sangat kuat. Untuk mengembangkan ekonomi syariah, maka diperlukan kerja sama atau sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, misalnya pemerintah, dunia perbankan Syariah, dunia nonperbankan, lembaga ekonomi syariah atau usaha-usaha syariah, lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial ekonomi dan juga perguruan tinggi.

Ada banyak jenis dan cakupan ekonomi syariah, namun demikian yang diperlukan penguatan adalah mengenai jaminan produk halal, zakat, wakaf dan sedekah. Selain juga asuransi syariah, akuntansi syariah, perbankan syariah dan usaha-usaha syariah. Semua ini dilakukan dalam tujuan untuk meningkatkan peran perekonomian syariah dalam keterlibatannya untuk membangun kesejahteraan umat.

*Wallahu a'lam bi al shawab.*

Surabaya, Desember 2021

**Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.**

*Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/Sekjen Kemenag RI Periode 2014-2018*

## *Kata Pengantar*

**Dr. H. Danial, M.Ag.**  
**(Rektor IAIN Lhokseumawe)**

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat intelektualitas dan spiritualitas, sehingga *book chapter* dengan judul “Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia” telah terbit. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. sumber aspirasi dan inspirasi serta keteladanan di berbagai aspek kehidupan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Sdr. Angga Syahputra dan tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe atas “jihad dan ijtihad” intelektual dalam merealisasikan *book chapter* ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami alirkan kepada para penulis yang telah mengerahkan segenap energi intelektual/keilmuan untuk menyumbangkan tulisan mereka, sehingga lahirnya *book chapter* ini.

Semua lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam mengemban amanah untuk melaksanakan caturdarma ilmu, yaitu; (1) mentransformasikan ilmu melalui pendidikan-pengajaran; (2) mengembangkan ilmu melalui penelitian; (3) mengaplikasikan ilmu melalui pengabdian; dan (4) melestarikan serta menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. *Book chapter* ini merupakan wujud pelaksanaan darma keilmuan yang ke-4, yaitu melestarikan dan menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. Semua upaya untuk mewujudkan terlaksananya caturdarma ilmu di atas khususnya dalam bentuk penerbitan (*book chapter*) sangat patut mendapat dukungan dan apresiasi, apalagi tema yang diusung adalah masa depan ekonomi syariah di Indonesia.

*Book Chapter* yang berada di tangan pembaca ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, ditulis oleh mereka yang memiliki latar keilmuan yang sesuai dengan tema yang diusung dan berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kedua, pembahasannya disusun secara sistematis, argumentatif, lugas, dan kaya nuansa. Ketiga, temanya sangat aktual di tengah bangkitnya spirit dan kesadaran keuangan Islam di tengah gempuran persaingan keuangan global.

Kami juga ingin menekankan pentingnya usaha berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi syariah ke tahapan berikutnya dan memperkuat ketahanan pasar untuk kemajuan industri. Dengan upaya dan inisiatif bersama, Kami sangat percaya ekspansi keuangan syariah secara global dan kontribusinya pada sistem keuangan yang adil akan terwujud.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca, semoga *book chapter* ini bermanfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, Januari 2022  
Rektor IAIN Lhokseumawe,

**Dr. H. Danial, S.Ag., M.Ag.**

## Apresiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

### *Kata Sambutan*

**Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat**

Saat ini posisi Indonesia pada tingkat ekonomi dan keuangan syariah global berada dalam posisi yang membanggakan. Hal ini terlihat dalam *Global Islamic Economy Indicator 2020/2021*, Indonesia berada di peringkat ke-4, dimana sebelumnya Indonesia menduduki peringkat ke-5 dunia. Di sisi lain, perkembangan keuangan syariah Indonesia juga kembali mencatatkan prestasi. Pada *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021*, dan *Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2021*, Indonesia juga menempati peringkat ke dua pada masing-masing index. Hal ini tentunya merupakan kabar gembira bagi Indonesia atas usaha yang terus dilakukan berbagai pihak dan dukungan pemerintah dalam memperluas perkembangan ekonomi syariah guna memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

Buku *chapter* yang diinisiasi oleh UPT. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe ini merupakan langkah baik yang terus kami dukung dalam rangka memberikan informasi kepada pembaca tentang Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia melalui hasil kajian riset yang dilakukan oleh akademisi, peneliti dan cendekiawan dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia yang *concern* terhadap ekonomi syariah. Selain memberikan informasi, buku ini tentunya dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi berbagai *stakeholder* dan yang tidak kalah penting menjadi upaya meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.

KNEKS memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas dedikasinya memberikan sumbangsih bagi percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Berbagai pihak perlu terus bersinergi, bahu-membahu, berjabat-tangan dalam berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasikan perkembangan ekonomi syariah di negeri tercinta ini. Semoga upaya-upaya yang dilakukan para penulis menjadi amal kebajikan yang tercatat dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Jakarta, 22 Desember 2021

**Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat**

*Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR EDITOR</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR PROF. DR. H. M. YASIR NASUTION</b> .....	xi
<i>(Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan, Ketua DPS Bank Sumut Syariah)</i>	
<b>KATA PENGANTAR PROF. DR. H. NUR SYAM, M.Si.</b> .....	xiii
<i>(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Sekjen Kemenag Periode 2014-2018)</i>	
<b>KATA SAMBUTAN DR. H. DANIAL, M.Ag.</b> .....	xxiii
<i>(Rektor IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>KATA SAMBUTAN ASSOC. PROF. DR. SUTAN EMIR HIDAYAT</b> .....	xxv
<i>(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI)</i>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxvi
<b>KONDISI TERKINI EKONOMI SYARIAH</b> .....	1
<i>Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan., S.E.I., M.E.I. (FEB – Universitas Malikussaleh)</i>	
<b>BONUS DEMOGRAFI BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH</b> .....	12
<i>Nursantri Yanti, M.E.I. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	
<b>EKONOMI SYARIAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA</b> .....	23
<i>Khalish Khairina, M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>LITERASI EKONOMI SYARIAH</b> .....	34
<i>Wahyu Syarvina, MA. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	
<b>RASIO INDEX SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA</b> .....	46
<i>M. Fauzan, M.E.I. (FEBI – IAIN Padangsidimpuan)</i>	
<b>OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH</b> .....	57
<i>Dr. Hj. Asmawati, S.E., MM. (FEM Universitas Indo Global Mandiri)</i>	
<b>LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK</b> .....	66
<i>Asiah Wati, S.E.Sy., M.E. (Fakultas Syariah – UIN Raden Mas Said Surakarta)</i>	

<b>LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK</b> .....	77
<i>Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc. (FAI – Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
<b>POTENSI FINANCIAL TECHNOLOGY</b> .....	87
<i>Ichsan, Lc., M.E.I. (FEB – Universitas Malikussaleh)</i>	
<b>GREEN SUKUK DAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN</b> .....	95
<i>Rahmawati, MA. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>ASURANSI SYARIAH</b> .....	103
<i>M. Iqbal, S.H., M.E. (FEBI – UIN Raden Fatah Palembang)</i>	
<b>WISATA HALAL</b> .....	115
<i>Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. (Magister Ilmu Agama Islam, FIAI UII Yogyakarta)</i>	
<b>POTENSI HALAL FOOD &amp; BEVERAGES</b> .....	125
<i>Iskandar Chang, M.Si. (FEBI – IAIN Salatiga)</i>	
<b>POTENSI BISNIS HALAL COSMETICS DAN HALAL FASHION DI INDONESIA</b> .....	134
<i>Dr. Hj. Malahayatie, MA. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>DAMPAK KAWASAN INDUSTRI HALAL BAGI PEREKONOMIAN</b> .....	144
<i>Arna Asna Annisa, MSI. (FEBI – IAIN Salatiga)</i>	
<b>ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF</b> .....	154
<i>Asra, S.Sy., M.Ag. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>PERAN AUDITOR SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH</b> ..	163
<i>Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>PERAN AKUNTAN SYARIAH</b> .....	172
<i>Isra Maulina, SE., M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>PENTINGNYA AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERWAKAFAN INDONESIA</b> .....	181
<i>Dr. Lesi Hertati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAPF., CAPM. (Fakultas Ekonomi Akuntansi - Universitas Indo Global Mandiri)</i>	
<b>TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI PERDESAAN</b> .....	195
<i>Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	

# BONUS DEMOGRAFI BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Nursantri Yanti, M.E.I.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - UINSU Medan

Email: [nursantriyanti@uinsu.ac.id](mailto:nursantriyanti@uinsu.ac.id)

## A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah pada sektor keuangan yang terus meningkat lebih dari 5% telah merambah ke bidang digitalisasi. Dari sisi praktis, potensi ekonomi syariah Indonesia sangat besar dalam berbagai hal seperti produk halal, fashion, kosmetik, pariwisata dan pendidikan Islam. Ada beberapa faktor yang menjadi penopang tumbuhnya ekonomi syariah, salah satunya adalah bonus demografi. Bonus demografi dapat dijadikan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang didukung dengan adanya sumber daya insani dimana penduduk yang jumlah usia produktif cukup besar.

Bonus demografi itu sendiri dapat diartikan sebagai perubahan jumlah penduduk dan pengurangan beban ketergantungan (*dependency ratio*) pada penduduk yang tidak produktif. Dengan kata lain, imbalan demografis adalah imbalan yang dinikmati suatu negara karena tingginya proporsi penduduk produktif (15-64 tahun) dalam proses pertumbuhan penduduk negara tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksikan Indonesia akan mengalami masa demografi pada tahun 2020-2035. Dimana usia produktif pada saat itu diprediksi lebih besar dari 6% dari jumlah masyarakat Indonesia yaitu 297 juta jiwa, kondisi ini merupakan kondisi yang baik agar status Indonesia mampu menjadi sebuah Negara maju. Tahun 2020 merupakan awal dimulainya usia paling produktif dan berakhir pada tahun 2035 di Indonesia. Bonus demografi merupakan peluang dalam menjamin pertumbuhan dan percepatan ekonomi untuk menjadi sebuah Negara maju. Saat itulah Indonesia membangun visi besar di dunia, yang kedepannya mampu berperan baik dalam perdagangan bebas dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) di Asia dan dunia.

Pada kondisi yang sama, prestasi pemuda Indonesia telah mendukung dalam peningkatan kembali roda perekonomian nasional. Data BPS juga memperlihatkan bahwa diantara penyumbang produk domestik bruto (PDB) Indonesia industri kreatif tekah menyumbang 7%. Indonesia kebanjiran dana investasi puluhan miliar rupiah pada 62 startup di Tahun

2015. Selain itu data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pendapatan belanja online (*e-commerce*) Indonesia pada 2015 mencapai di atas Rp 200 triliun. Perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh pesat jika tren ini dikelola dengan baik.

Berbicara tentang bonus demografi, hal ini tentu saja menimbulkan dilema antara menguntungkan atau bahkan merugikan Indonesia. Bonus demografi dapat memberikan peluang dalam mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia dan dapat digunakan dalam hal meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun jika tanpa persiapan yang memadai, bonus demografi sebaliknya dapat menjadi beban pemerintah dan meningkatkan pengangguran.

## B. Bonus Demografi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bonus diartikan sebagai tambahan upah seperti hadiah ataupun intensif gaji. Yang perlu ditegaskan dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah tambahan atau pemberian. Jika kita menerima tambahan upah, hal ini merupakan sebuah bonus yang kita peroleh. Bonus demografi bukanlah gaji atau uang. Namun bonus demografi dapat dipahami sebagai kondisi ekonomi yang memiliki ciri bahwa lebih besarnya jumlah penduduk yang berusia produktif dibanding jumlah penduduk yang berusia nonproduktif. Menurut Wongboonsin (2003) bahwa Bonus Demografi (*demographic deviden*) merupakan sebuah keuntungan ekonomis yang dikarenakan rasio ketergantungan penduduk yang menurun.

Wilayah Indonesia antara tahun 1971 dan 2000 memiliki rasio ketergantungan atau *Depedency Ratio* yang mengalami penurunan yaitu sebesar 53 di tahun 2020 dan sebesar 81 pada tahun 1971 (Sita Dewi, 2013). Artinya kondisi Indonesia semakin baik atau semakin meningkat. Rasio ketergantungan adalah rasio penduduk yang tidak mampu berproduksi, yaitu 01 sampai 65, dengan penduduk usia produktif 156 (Harto Nurdin, 1981). Rasio ketergantungan menjelaskan jumlah orang dalam kelompok usia tidak aktif namun tercakup dalam usia produktif. Misalnya, rasio ketergantungan Indonesia adalah sebesar 52, yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk Indonesia usia kerja, sekitar 52 adalah usia tidak bekerja. (Falikah, 2017, 92).

$$DR = \frac{\text{Penduduk } 0-14 \text{ Tahun} + \text{Penduduk } 65+}{\text{Penduduk } 15-64 \text{ Tahun}} \times 100\%$$

Bonus demografi didapatkan apabila usia produktif suatu penduduk sangat tinggi yaitu usia penduduk sekitar 15-64 tahun, tetapi usia muda dalam suatu penduduk lebih sedikit dan jumlah usia lanjut juga sedikit. kondisi ini merupakan keuntungan yang memberi manfaat ekonomi bagi Indonesia yang didapikandari pengurangan ketergantungan karena penurunan jangka panjang dalam angka kematian dan kesuburan anak. Namun apabila tidak dipersiapkan secara bijak, maka bonus demografi ini tidak akan ada gunanya. Seperti melalui peningkatan mutu sumber daya insani, dan membuat lapangan kerja untuk menyamai kualitas sumber daya insani tersebut.

Bonus demografis adalah keuntungan ekonomi yang diberikan oleh rasio ketergantungan yang dihasilkan dari penurunan angka jumlah kematian bayi juga kesuburan dalam jangka panjang. Biaya investasi dalam pemenuhan kebutuhan suatu penduduk dapat dikurangi apabila jumlah penduduk usia muda (01 tahun) dan jumlah penduduk produktif besar (15-64 tahun) berkurang, sehingga biaya tersebut bisa dialihkan dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi juga kesejahteraan keluarga (Adioetomo, 2004).

Bonus demografis dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan demografis, khususnya dari aspek:

1. Investasi
2. Modal Tenaga Kerja
3. Peran Perempuan, dan
4. Penawaran tenaga kerja

Sehingga pada usia produktif modal manusia dapat diserap melalui penawaran pasar tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Kenyataannya tidak bisa dipungkiri jika perempuan memiliki peran dalam pasar tenaga kerja, ketika perempuan memiliki anak yang sedikit, maka peluang untuk memiliki uang lebih untuk diinvestasikan/ditabung akan semakin besar.

### **C. Bonus Demografi Bagi Pengembangan Ekonomi Syariah**

Pertumbuhan ekonomi umat Islam di Indonesia saat ini bisa dikatakan begitu menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari perkembangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, misalnya tersedianya Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah, DSN-MUI yang menetapkan Peraturan Produk Keuangan/Lembaga Syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang disajikan dan dilaporkan oleh DSAK-IAI, saat ini Indonesia mempunyai organisasi baru yang menandai masa

keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada aktivitas dalam sektor jasa keuangan dengan bertanggung jawab dan mandiri serta organisasi lain yang mendukung perkembangan ekonomi syariah jelas menunjukkan semakin kuat dan progresif konsepsi ekonomi syariah di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia juga dapat diketahui dari banyaknya organisasi bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, misalnya; Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS), Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan lain sebagainya. Kemajuan ekonomi Islam yang berarti tampaknya juga perlu diuji keandalan, ketahanan, dan keberlanjutannya saat bergabung dengan MEA. Aktivis ekonomi Muslim di Indonesia harus memitigasi persaingan dan tantangan yang semakin kuat dan ketat dari negara-negara ASEAN. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa negara anggota ASEAN, yakni Singapura dan Malaysia, adalah dua negara yang lebih dikenal dari Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Jumlah penduduk Muslim yang besar serta pertumbuhan ekonomi syariah diharapkan dapat menopang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem ekonomi syariah yang diterapkan, diharapkan dapat menjadi keunggulan dalam mendukung ekonomi nasional di tingkat ASEAN dan dunia. Indonesia jangan mau kalah bersaing karena banyaknya barang-barang dari luar negeri yang berkualitas. Tantangan yang paling besar dalam pengembangan dan penerapan ekonomi syariah adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk dalam keuangan syariah dan penerapan ekonomi syariah itu sendiri.

Pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk memperkuat perekonomian sektor syariah di Indonesia hingga MEA. Pertama, pemerintah harus melakukan konsultasi dan sosialisasi publik seluas-luasnya di seluruh Indonesia agar MEA dapat dipahami oleh publik. Kedua, pemerintah juga harus serius mengembangkan rencana pengembangan ekonomi syariah yang efisien. Rencana Induk adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ketiga, pemerintah harus memobilisasi berbagai alat untuk secara serius mengembangkan ekonomi syariah, karena merupakan cara yang efektif untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Kementerian dan organisasi pemerintah lainnya juga akan lebih tertarik dalam meningkatkan

perkembangan ekonomi syariah seperti melibatkan industri keuangan syariah, serta pengembangan kurikulum dan sistem pendidikan ekonomi keuangan syariah. Keempat, OJK dan BI harus tetap mendorong peningkatan kerjasama dengan pelaku ekonomi syariah serta mengupayakan perkembangan ekonomi syariah.

Selain itu, dukungan semua pihak juga sangat dibutuhkan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari perguruan tinggi, perusahaan industri dan pemangku kepentingan lainnya. Kelima, penguatan pengembangan ekonomi syariah dari sisi sistem, regulasi, perangkat, sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan UMKM, ini akan menjadi prioritas utama untuk mendukung transformasi ekonomi syariah di tanah air. Keenam, penyederhanaan akses keuangan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN juga perlu dilakukan selama dapat menguntungkan dan memperkuat ekonomi syariah di Indonesia.

Rasio ketergantungan akan meningkat kembali setelah tahun 2045, yang didominasi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas, sehingga selama bonus demografi harus dimaksimalkan, maka hasilnya dapat diinvestasikan secara efektif untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi periode pasca perang (Sugiharto dan Setiawan 2015). Jumlah penduduk yang meledak pada masa produktif akan membawa manfaat ekonomi yang besar jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peningkatan tabungan masyarakat untuk berinvestasi;
2. Adanya peningkatan investasi sumber daya manusia;
3. Pentingnya meningkatkan peran perempuan di pasar tenaga kerja karena selain penurunan jumlah anak yang memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja perempuan juga dapat membantu meningkatkan penghasilan keluarga yang berdampak pada kesejahteraan;
4. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja;
5. Peningkatan pendapatan perkapita melalui kemampuan bekerja secara efisien (Maryati 2015).

#### **D. Kebijakan Pemerintah**

Saat ini Indonesia sedang bersiap menikmati bonus demografi yang menjadi keuntungan dengan memiliki demografi penduduk muda. Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk Indonesia akan

diproyeksikan pada tahun 2020 mencapai 269,6 juta jiwa. Indonesia akan memperoleh keuntungan yang besar jika pemerintah dapat mengelola bonus demografi secara baik dan profesional, dimana akan berkurangnya potensi rasio beban ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan ini merupakan jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk usia nonproduktif yang diperbandingkan.

Dengan adanya bonus demografi ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia apabila pemerintah mampu membuat kebijakan sosial serta ekonomi dibidang kesehatan, pendidikan, tatakelola dan ekonomi tersebut. Namun dalam memkasimalkan bonus demografi ini juga akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut terlebih dengan kondisi adanya virus Covid-19 saat ini.

Dimana virus ini dikonfirmasi muncul pertama kali pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 di Indonesia. Virus ini sebelumnya belum diketahui penyakit yang disebabkan sebelum mewabahnya di Wuhan. World Health Organization (WHO) menyatakan, covid-19 adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan dan menjadi penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah penyebab terjadinya pandemi di banyak negara di seluruh dunia.

Dengan demikian, suatu tantangan bagi Indonesia dengan adanya virus covid-19 ini terutama dalam menghadapi bonus demografi yang akan diperoleh. Karena virus covid-19 ini telah melemahkan sektor kesehatan, pendidikan, tatakelola dan ekonomi di Indonesia seperti halnya saat ini banyak masyarakat yang di phk dan menjadi pengangguran. Sehingga diperlukannya upaya mengimbangi banyaknya kuantitas dengan adanya kualitas untuk mempertahankan keadaan sosial dan ekonomi dalam menghadapi bonus demografi.

Upaya yang perlu dilakukan ini adalah pengembangan sumber daya insani. Dimana dalam perspektif Islam hal ini adalah suatu keharusan yang menunjukkan bahwa Islam begitu peduli akan harkat dan martabat manusia, sebab dalam Islam manusia berada pada posisi yang mulia dan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

*Artinya: "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."*

Sehingga dalam menghadapi banyaknya kuantitas manusia saat bonus demografi juga harus diimbangi dengan kualitas yang dimiliki sumber daya manusia dengan menggali potensi dari kelebihan yang dimilikinya, karena setiap manusia telah diciptakan dengan diberi kelebihan. Kemudian dengan kelebihan yang dimiliki setiap manusia inilah yang akan berperan menstabilkan kembali sektor kesehatan, pendidikan, tata kelola dan ekonomi melalui penyesuaian yang sesuai dengan syariat Islam.

Seperti halnya sejumlah pernyataan tentang konsep manusia di dalam Alquran yang memosisikan manusia sebagai makhluk yang berkualitas, kreatif dan produktif dengan berbagai macam istilah: 1) Sebagai khalifah di muka bumi; 2) Sebagai ciptaan yang dimuliakan; 3) Sebagai pewaris dan pengelola Kekayaan bumi; 4) Sebagai pengemban Amanah; 5) Sebagai penakluk sumberdaya alam.

Oleh karenanya manusia harus mampu dalam memadukan berbagai sumber daya dalam hal meningkatkan kualitas hidup dalam menghadapi bonus demografi. Perpaduan sumber-sumber daya itu meliputi sumber daya insani (*human resource*), sumber daya alam (*natural resource*), dan teknologi. Dalam memadukan sumber-sumber daya ini diperlukannya pengelolaan yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad Saw. mengenai konsep sumber daya insani dalam Islam.

Konsep pertama: Manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Oleh sebab itu semua aktivitas manusia harus berupa ibadah yang dalam arti luas dan bukan sekedar menurut ritual semata. Setiap aktivitas manusia dapat menjadi layak disembah jika untuk mencari keridhaan Allah Swt. Konsep kedua: Manusia merupakan *khalifatullah fil ardhli* - wakil Allah di bumi, dimana misinya adalah membuat bumi menjadi makmur. Akibat dua konsep tersebut ialah bahwa semua aktivitas manusia akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan nantinya.

Dari perspektif ini, Islam memandang permasalahan pengelolaan umat tidaklah perkara mudah. Islam mengupayakan sumber daya insani agar berkontribusi dalam kemakmuran bumi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. yang secara optimal memanfaatkan potensi yang telah dianugerahkan Allah Swt. Sehingga dalam menghadapi bonus demografi diperlukan sumber daya manusia yang mampu menstabilkan kegiatan sosial serta ekonomi dibidang kesehatan, pendidikan, tatakelola dan ekonomi yang

saat ini mengalami penurunan dengan adanya virus covid-19 melalui kebijakan perlindungan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberian softskill dan pengoptimalan pendidikan agama maupun wawasan yang diiringi dengan pengaplikasian skill dan diimbangi keuletan bekerja serta peduli terhadap sosial kemasyarakatan seperti halnya menciptakan lapangan pekerjaan maupun memberikan CSR. Yang mana hal-hal tersebut bisa bernilai ibadah dan akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat.

Untuk mendapatkan bonus demografi di Indonesia kebijakan pemerintah memiliki peran penting di dalamnya. Pemerintah harus mengurangi dan mempertimbangkan kembali pemberian izin investor asing yang akan membuat industri manufaktur padat karya seperti usaha tekstil dan sepatu, karena industri ini sering berpindah dimana industri akan melakukan relokasi dengan upah yang lebih rendah di negara lain, sumber daya manusia yang banyak, dan lemahnya peraturan pemerintah.

Pemerintah harus membatasi aturan pemberian izin kepada investor asing agar kesejahteraan pekerja terjamin dan meminimalisir risiko PHK. Menciptakan instrumen hukum yang menjamin perkembangan usaha atau investasi juga dapat menjadi solusi untuk melindungi dan mendukung industri kecil yang sedang berkembang.

Selain itu, hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi bonus demografi bagi pengembangan ekonomi syariah dari aspek keuangan syariah mencakup beberapa tindakan antara lain:

1. Mensinergikan hubungan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan *stakeholder* terkait, dimana hal ini dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut: Mendukung pendirian Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah serta pembentukan Pusat Riset dan Pengembangan Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia.
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor usaha dan permodalan dengan melakukan beberapa hal berikut antara lain: (i) disempurnakannya kebijakan terkait modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah dan (ii) mendukung penuh pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta (iii) meningkatkan peran dan komitmen BUK untuk penyempurnaan pelayanan perbankan syariah yang berdampak pada peningkatan *market share* perbankan syariah.
3. Melakukan perluasan sektor keuangan untuk memperbaiki struktur dana dengan melakukan beberapa hal berikut khususnya memberikan peran perbankan syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq shadaqah, serta memperluas kesempatan bank syariah untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan dana pemerintah baik di

pusat maupun daerah dan juga pengelolaan dana BUMN/BUMD, sekaligus mendukung bank syariah dalam penempatan hasil emisi sukuk dengan prinsip syariah.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keberagaman produk, dengan melakukan beberapa hal berikut: (i) melakukan pengembangan produk perbankan syariah dengan menguatkan peran WGPS (*Working Group Perbankan Syariah*), (ii) Penyempurnaan regulasi terkait produk dan kegiatan perbankan dan (iii) meningkatkan keunggulan layanan dan menyesuaikan produk sesuai dengan perubahan selera konsumen.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya insani dan serta penyempurnaan teknologi informasi maupun peningkatan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan melakukan beberapa hal berikut antara lain: (i) Penyusunan dan pemutakhiran kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pengklasifikasian kapasitas dan review standar kompetensi bankir syariah dan penyempurnaan kebijakan terkait pengalokasian anggaran peningkatan mutu sumber daya insani bank syariah, (iii) Melakukan pengkajian ulang terkait kebijakan/regulasi dalam memanfaatkan Informasi Teknologi (*sharing IT*) dan (iv) Regulasi terkait pengembangan *inter-operability* perusahaan pusat maupun unit usaha syariah.
6. Melakukan peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat, dengan melakukan beberapa hal berikut: (i) menyelenggarakan Pasar Rakyat Syariah dan mempererat hubungan kerjasama dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, atau melakukan sosialisasi perbankan syariah secara gencar ke masyarakat.
7. Mensinergikan antara regulasi dan pengawasan, dengan melakukan beberapa hal berikut: (i) penyempurnaan kebijakan/regulasi terkait *financing to value* (FTV), (ii) mengembangkan dan menyempurnakan standar produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan jenis usaha, (iii) menyempurnakan pemanfaatan aplikasi *Early Warning System* (EWS) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (iv) menyempurnakan regulasi terkait kelembagaan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah serta adanya perbaikan pedoman pengawasan dan perizinan.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa dalam upaya mendapatkan bonus demografi di Indonesia diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyadarkan seluruh lapisan masyarakat akan tugas dan

tanggung jawab untuk kemajuan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan berbagai tindakan dan sosialisasi mengenai masalah ini bagi seluruh masyarakat Indonesia, anak sekolah, akademisi dan masyarakat umum. Sehingga bonus demografi dapat menjadi peluang bagi bangsa Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan bukan dilema yang menjadikan hal ini merugikan bangsa kita sendiri.

## E. Daftar Pustaka

- Falikhah, Nur. (2017). *Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, (16)32. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v16i32.1992>.
- Harto, Nurdin. (1981). *Struktur dan Pesebaran Penduduk dalam Dasar dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kusmanto, Thohir Yuli. (2014). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No. 2, 213-235.
- Maryati, Sri. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidika: Tantangan Menuju Bonus Demografi Di Indonesia. *Economic And Economic Education*, 3(2): 124-36. <http://ejournal.stkipgrisumbar.ac.id/index.php/economica/article/view/249/641>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Mei Santi. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 6(01), 47-56. <https://ejournal.staimtulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/377>
- Sita Dewi. (2013). Rasio Ketergantungan Analisa untuk Indonesia dalam *Jurnal Ilmiah Jayakarta*, edisi No. 4 tahun VI.
- Sita Dewi, Dwi Listyowati, Bertha Elvy Napitupulu. (2018). Bonus Demografi Di Indonesia: Suatu Anugerah Atau Petaka. *Journal of information system, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 2, No. 3.

Sri Murtiningsih Adioetomo. (2004). *Bonus Demografi dan Tuntutan Kelangsungan Program KB di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiharto dan Deny Setiawan. (2015). Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. *Jupis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1): 1-12.  
<https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V7I1.2268.G4468>



**Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution**

Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan  
Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah

Buku chapter Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia ini merupakan cerminan bagaimana kondisi ekonomi syariah saat ini di Indonesia, serta upaya yang dibangun oleh para penulis dalam menggali dan menguraikan melalui hasil pemikiran maupun riset tentang kondisi ekonomi syariah yang ada pada saat ini dan tentunya masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Apresiasi saya kepada seluruh penulis yang turut serta dalam perjuangan membesarkan ekonomi syariah di Indonesia melalui tulisan ini, dan tentunya kepada pihak UPT. Jurnal IAIN Lhokseumawe yang mampu menginisiasi terbitnya buku ini. Tentunya hal ini akan menjadi amal kebaikan dan bagian dari upaya para akademisi, praktisi dan cendikiawan berjuang melalui “kekuatan” yang dimiliki.

**Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.**

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya  
Sekjen Kemenag RI Periode 2014-2018

Sebagai akademisi yang selama ini berkecimpung di dalam program pembelajaran, terutama Metode Studi Islam, termasuk Studi Ekonomi Syariah, pada Program Doktor di UIN Sunan Ampel dan di UIN Mataram dan UIN Malang, maka saya tentu menyambut dengan riang gembira ketika diminta untuk memberikan “Kata Pengantar” dalam buku yang disusun oleh 20 dosen dari berbagai Universitas di Indonesia dengan tema “Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia”. Buku ini diedit oleh Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Dosen Ilmu Fiqh pada UIN Sumatera Utara) dan Sdr. Taufiq, SH.I., MA. (Wakil Dekan III FEBI – IAIN Lhokseumawe). Sebuah buku yang bisa menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi dan peminat studi ekonomi Syariah di berbagai universitas di Indonesia.

**Dr. H. Danial, S.Ag., M.Ag.**

Rektor IAIN Lhokseumawe

Semua lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam mengemban amanah untuk melaksanakan caturdarma ilmu, yaitu; (1) mentransformasikan ilmu melalui pendidikan-pengajaran; (2) mengembangkan ilmu melalui penelitian; (3) mengaplikasikan ilmu melalui pengabdian; dan (4) melestarikan serta menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. Book chapter ini merupakan wujud pelaksanaan darma keilmuan yang ke-4, yaitu melestarikan dan menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. Semua upaya untuk mewujudkan terlaksananya caturdarma ilmu di atas khususnya dalam bentuk penerbitan (book chapter) sangat patut mendapat dukungan dan apresiasi, apalagi tema yang diusung adalah masa depan ekonomi syariah di Indonesia.

**Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat**

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS

KNEKS memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas dedikasinya memberikan sumbangsih bagi percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Berbagai pihak perlu terus bersinergi, bahu-membahu, berjabat-tangan dalam berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasikan perkembangan ekonomi syariah di negeri tercinta ini. Semoga upaya-upaya yang dilakukan para penulis menjadi amal kebajikan yang tercatat dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**IAIN Lhokseumawe**  
Jln. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1  
Buket Rata, Alue Awe, Lhokseumawe

